

**BAB IV**  
**GAMBARAN UMUM**  
**PERKEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA**

**Keadaan Sebelum Perang Dunia II**

Sejarah perbankan Indonesia pada masa sebelum perang dunia II mempunyai tiga buah bank. Ketiga bank tersebut adalah Dengan Javasche Bank N.V. yang didirikan tanggal 10 Oktober 1627. Kemudian dinasionalisir oleh pemerintah RI pada tanggal 6 Desember 1951 dan akhirnya menjadi Bank Sentral di Indonesia berdasarkan UU no. 13 tahun 1968. Bank yang kedua adalah Dengan Algemene Volkscrediet Bank, didirikan tahun 1934 di Batavia (Jakarta). Kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang (pada masa pendudukan Jepang) dengan nama Syomin Ginko dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia Dengan Post Paar Bank adalah bank yang didirikan tahun 1898, yang selanjutnya dengan UU no. 9 tahun 1950 diganti dengan nama Bank Tabungan Pos dan terakhir dengan UU no. 20 tahun 1968 menjadi Bank Tabungan Negara (**Thomas Suyatno; 1993: 4**).

**Keadaan Sesudah Perang Dunia II (1945 – 1949)**

Bergejolaknya keadaan negara pada masa itu yang membuat terbentuknya dua wilayah yakni daerah republik yang dikuasai RI dan daerah federal yang merupakan wilayah RI yang diduduki Belanda membuat masing-masing daerah mengalami perkembangan, dimana perkembangan perbankan di daerah Republik

Indonesia masa itu mempunyai dua bank, yakni bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Perkembangan perbankan di daerah Federal saat itu memunculkan bank-bank nasional swasta yang pada umumnya merupakan bank umum yang bergerak dibidang perdagangan. Bank-bank tersebut adalah : N.V. Bank Sulawesi di Manado, didirikan tanggal 8 Februari 1946; N.V. perniagaan Indonesia, didirikan pada tanggal 11 Maret 1948; dan Bank Timur N.V. Semarang, didirikan pada tanggal 20 September 1949 yang kemudian diganti namanya menjadi PT. Bank Gemari dan kemudian melakukan merger dengan Bank Sentral Asia (BCA), Bank Dagang Indodnesia N.V. di Banjarmasin didirikan pada tanggal 12 Oktober 1949, Kalimantan Trading Corporation N.V. di Samarinda didirikan pada tanggal 18 Februari 1950 yang kemudian merger dengan Bank Pasific (Thomas Suyatno, dkk; 1993: 5).

Pada perkembangan selanjutnya berdasarkan UU no. 13 tahun 1968 Bank Indonesia, di samping itu bank-bank umumpun bermunculan demikian juga bank-bank pembangunan, balok tabungan, bank-bank rual (sekunder) dan juga lembaga-lembaga keuangan bukan bank.

#### **4.1. Perkembangan Kebijakan Perbankan di Indonesia**

##### **4.1.1. Phase Rehabilitasi dan Ekonomi**

Sejalan dengan periode perkembangan sejarah dan politik, kebijakan dan struktur perkreditan yang merupakan bagian dari kebijakan ekonomi dan pembangunan mengalami perkembangan pula. Jikalau dapat dibedakan, periode pertama adalah sejak tahun 1950 sampai tahun 1959, periode

dua sejak tahun 1959 sampai 1965 / 1967, dan periode ketiga adalah tahun-tahun terakhir tersebut hingga sekarang. Kebijakan ekonomi dan pembangunan serta perkreditan selama periode-periode tersebut mempunyai karakteristik masing-masing (**Dr. Farried Wijaya, dan Dr. Soetatwo Hadiwigeno, 289**).

Selama periode antara tahun 1950 – 1957, dialami inflasi lunak dan kemudian berkembang menjadi hiper inflasi sejak tahun 1960 sampai 1968. Kebijakan moneter perbankan pada periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pada awal orde baru dimaksudkan untuk mengatasi keadaan perekonomian yang pada saat itu dapat dikatakan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Salah satu indikasinya adalah tingginya inflasi yang bisa mencapai sekitar 650 persen pertahun.

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan moneter dan kredit sebelum tahun 1957, seperti yang diuraikan Charlesworth, Bank Indonesia menjalankannya dengan cara-cara : (**Prof. M. Dawam Raharjo; 1995 : 143**).

1. Mengubah suku bunga yang dikenakan kepada debitur, meskipun fasilitas diskonto ulang (rediscourt) terhadap proses atau surat-surat utang atau masih jarang dilakukan.
2. Melalui operasi pasar terbuka (Open Market Operation), meskipun pasar uang yang sudah berjalan bersifat sederhana.
3. Pemberian kredit kepada bank-bank komersial, dengan ketentuan pagu kredit (ceiling) langsung atau dihubungkan dengan besarnya kredit atau jumlah kekayaan tertentu.

4. Pengendalian kredit kuantitatif dengan menentukan sektor-sektor kegiatan ekonomis yang boleh diberikan kredit.
5. Menetapkan tingkat suku bunga maksimum.

Dalam rangka meningkatkan mobilisasi dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan sekaligus untuk mengurangi laju pertumbuhan uang beredar maka Inpres no. 28 tahun 1968 ditetapkan beberapa ketentuan yang diharapkan dapat merangsang masyarakat menyimpan uangnya pada bank dalam bentuk deposito dengan cara yaitu : (**Dahlan Siamat: 1995: 20**).

- a. Penawaran tingkat bunga yang tinggi.
- b. Bebas pengusutan asal-usul yang didepositokan.
- c. Jaminan pengembalian atas simpanan oleh BI.
- d. Pembebasan pajak atas hasil bunga.
- e. Pengetatan rahasia bank atas pemilik.

Kemudian Bank Indonesia memberikan subsidi sebesar sepertiga dari jumlah bunga yang dibayarkan untuk deposito berjangka waktu 6 bulan dan 12 bulan untuk membantu bank-bank (khususnya bank pemerintah) menurut biaya dana yang mahal akibat tingginya tingkat suku bunga yang ditetapkan pemerintah tersebut. Berdasarkan Inpres no. 28 tahun 1968, tingkat suku bunga deposito yang ditetapkan pemerintah yaitu :

Tabel 4.1  
Tingkat Suku Bunga (Persen)

Jangka Waktu Perbulan	Tingkat Suku Bunga
1 bulan	1,5 %
3 bulan	4,0 %
6 bulan	5,0 %
12 bulan	6,0 %

Sumber : Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Intermedia Jakarta, 1995, hal 29.

Periode setelah tahun 1966 penanggulangan inflasi yang merupakan musuh nomor satu bagi satu perekonomian kita, merupakan program utama, program stabilitasi telah dilaksanakan dengan cukup berhasil, laju inflasi turun secara dratis dari 650% pada tahun 1966 menjadi 10% di tahun 1969; 8,8% di tahun 1970 dan sesudah itu berkisar di sekitar tingkat riil. Hal ini disebabkan karena kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal dan moneter serta kebijaksanaan hasil dibidang ekonomi yang konsisten dan terarah.

#### **4.1.2. Pase Deregulasi Kebijakan Sektor Perbankan**

##### **4.1.2.1 Perkembangan Kebijakan Moneter di Indonesia Sebelum Tahun 1966**

Dalam UU pokok Bank Indonesia tahun 1953, Bank Indonesia diberi tugas utama untuk menjaga stabilitas moneter, terutama memelihara mata uang rupiah. Tapi di lain pihak Bank Indonesia mempunyai tugas pula untuk menciptakan likuiditas dalam masyarakat, dengan mengatur volume uang yang

beredar, dan melancarkan jalannya pembayaran luar negeri dengan resiko bisa menimbulkan tekanan inflator (**Dahlan Siamat, 1995: 128**).

Tahun 1950-an, sektor keuangan formal di Indonesia mempunyai Bank Sentral, 5 Bank umum dan sebuah bangunan milik negara, serta lebih kurang dari bank swasta dan sebuah bank asing.

Situasi moneter berkaitan erat dengan kebijaksanaan fiskal yang pengendaliannya di tangan dan dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementrian dan Departemen Keuangan. Defisit dalam anggaran pemerintah dan Belanja Negara akan berdampak inflasi. Karena defisit akan biaya oleh percetakan uang yang menambah volume uang beredar. Namun jika program-program pemerintah dari belanja negara akan berdampak inflasi. Karena defisit akan dibiayai oleh percetakan uang yang menambah volume uang beredar. Namun jika program-program pemerintah dapat mendorong produktivitas masyarakat dan perkembangan bisnis, sehingga meningkatkan produktivitas nasional arus barang, maka tekanan inflasi akan bisa diimbangi oleh pertumbuhan produksi. Logika inilah yang menimbulkan gagasan yang berpengaruh kepada sementara pimpinan. Indonesia pada dasawarsa 1950-an untuk membiayai pembangunan dengan percetakan uang yang diciptakan olehg anggaran yang defisit.

Kegiatan perbankan pada waktu itu terutama ditujukan untuk melayani kelancaran perdagangan internasional. Obligasi-obligasi juga dikeluarkan pada waktu itu. Sejak tahun 1963 usaha tersebut terhambat dan gagal karena politik pemerintah pada saat itu, serta membiayai defisit APBN yang makin lama makin besar. Tingkat inflasi pada tahun 1965 telah begitu tingginya

yaitu mencapai lebih dari 60% sehingga yang dapat bertahan hanya bank-bank pemerintah yang berfungsi hanya menjadi cabang bank sentral, yaitu menciptakan uang. Jadi pada saat itu kebijaksanaan moneter hanyalah untuk membiayai defisit APBN yang besar.

Sebelum tahun 1966 bisa dianggap bahwa kebijaksanaan pembangunan di Indonesia lebih memprioritaskan kepada masalah politik dari pada ekonomi sehingga dibidang moneter menimbulkan banyak kesulitan. Pada saat itu ada campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam perekonomian sehingga ruang gerak sektor swasta menjadi sangat terbatas.

Pada keadaan demikian, masyarakat hanya sedikit menyalurkan tabungan pada sektor perbankan, demikian juga dengan para pemilik modal yang lebih suka menanamkan modalnya dalam beberapa komoditas atau dalam bentuk emas dalam waktu yang relatif singkat.

#### **4.1.2.2. Kebijakan Moneter Orde Baru**

Melihat keadan buruknya kondisi ekonomi terutama pada tahun 1962 hingga awal tahun 1966, maka pada sekitar tahun 1966 pemerintah Orde baru menjalankan kebijakan ekonomi dalam prioritas kearah stabilitas moneter dan fiskal lalu lintas devisa.

Orde baru mempunyai orientasi politik dan kebijaksanaan ekonomi yang lebih pragmatis, terarah dan konsisten. Stabilitas ekonomi dan lebih spesifik lagi adalah penghentian inflasi, merupakan program utama. Hal ini merupakan landasan bagi kebijaksanaan pembangunan dan ekspansi ekonomi selanjutnya

program ini cukup berhasil dilaksanakan melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter.

Pokok-pokok kebijaksanaan ekonomi dan prioritas ke arah stabilisasi moneter dan fiskal serta lalu lintas devisa yang dijalankan pemerintah Orde baru sekitar tahun 1966 tersebut adalah :

1. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian mulai dikurangi, pengusaha swasta diberi kesempatan untuk berperan lebih besar.
2. Pengawasan devisa yang telah berlaku ketat selama Orde lama, akhir tahun 1966 mulai dikurangi, meskipun sistem kurs devisa ganda masih diberlakukan dan sistem pengawasan devisa dihapuskan. Ini berarti sementara itu Indonesia menganut sistem lalu lintas devisa bebas.
3. Kebijaksanaan anggaran belanja berimbang dijalankan, meskipun defisit yang ada ditutup dengan pinjaman luar negeri.
4. Tindakan-tindakan perlengkapan diambil untuk menunjang kebijakan anti inflasi. Kebijakan ini antara lain: usaha-usaha mobilisasi tabungan penyaluran kredit bagi sektor-sektor penting dalam perekonomian, dan penyesuaian tingkat suku bunga perbankan.
5. Program tingkat suku bunga yang relatif tinggi yang mulai berlaku dalam bulan Oktober 1968 dibuat sedemikian rupa sehinggadapat mendorong masyarakat untuk menabung dalam sistem perbankan. Untuk keperluan ini bank-bank di Indonesia menawarkan suku bunga yang tinggi bagi beberapa jenis deposito berjangka pada bank pemerintah yang berjumlah kurang dari Rp 5 milyar dalam tahun 1968 telah meningkat menjadi Rp 24 milyar pada

akhir tahun 1969 dan mencapai Rp 122 milyar pada bulan Desember 1972 (Siregar, AM . Perkembangan Kebijakan Keuangan 1966-1968).

Program-program yang dilaksanakan untuk stabilisasi dan juga program pelengkap seperti dijabarkan di atas ternyata mampu menekan tingkat inflasi.

Tingkat inflasi pada tahun 1962 dapat diturunkan dari 85,1% pada 1974, berkat upaya stabilisasi yang cukup keras dan intensif dapat diturunkan lagi menjadi 8,9% dan 2,5%. Begitu pula pada tahun 1972 dan 1973, tingkat inflasi menjadi 2 digit lagi, masing-masing 15,8% dan 27,8%. Tingkat inflasi rata-rata selama 5 tahun. 1969-1973 adalah 14,98%. Angka ini lebih rendah dari perkembangan JUB yang rata-rata 42,8% dan periode yang sama. dalam perbandingan jangka panjang, inflasi periode 1960-1965 rata-rata adalah 25% periode 1960-1965 (Prof. M. Dawam Raharjo, 1995, hal. 207).

Tabel 4.2  
Laju Inflasi 1966-1973  
(Persen)

Tahun	Laju Inflasi
1966	635,3
1967	112,3
1968	85,1
1969	9,9
1970	8,9
1971	2,5
1972	25,8
1973	27,8

Catatan: Inflasi berdasar pada indek biaya hidup di Jakarta.

Sumber : Bappenas, Kumpulan Data 1991 (Prof. M. Dawam Raharjo, 1995: 207).

Dari angka-angka itu dapat disimpulkan bahwa upaya mengurangi inflasi, dalam upaya umum untuk membangun perekonomian melalui perkreditan, dapat dikatakan cukup berhasil. Direktur keuangan dan perbankan, pemerintah secara berturut-turut adalah sebagai berikut :

### **Paket Kebijakan 1 Juli 1983**

Kebijaksanaan pemerintah 1 Juli 1983 ini lebih sering disebut dengan Pak Jun'83. Kebijakan ini lebih sebagai kebijaksanaan penyesuaian yang bersifat struktural dan mendasar. Phase deregulasi atau periode deregulasi yang dimulai dengan kebijaksanaan 1 Juni 1983 dengan berbagai peraturan yang bersifat mengurangi campur tangan dan keterlibatan pemerintah otoritas moneter.

Campur tangan Bank Sentral dikurangi secara bertahap dan keterlibatan dalam pengaturan berbagai kegiatan dan usaha Bank setelah semakin diserahkan kepada para pelaku perbankan.

Kebijaksanaan yang berkaitan dengan suku bunga, penyerahan dana, prekresitan, penciptaan produk-produk perbankan dan sebagainya (kecuali yang prioritas) semakin banyak di serahkan kepada masyarakat perbankan sendiri. Namun kebijaksanaan pendirian bank-bank baru maupun penyebaran bank-bank yang sudah dan selama periode 1 Juni 1983 sampai dengan Oktober 1988 masih dibatasi.

Deregulasi 1 Juni 1983 ini mempunyai inti dari ciri pokok sebagai berikut:

1. Penghapusan pagu kredit dan aktiva lainnya sebagai instrumen pengendalian moneter.
2. Pengurangan kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kecuali untuk sektor-sektor yang berprioritas tinggi.
3. Pemberian kebebasan bagi bank-bank untuk menetapkan suku bunga sumber dana deposito maupun tingkat bunga kredit kecuali sektor-sektor yang berprioritaskan.

Menurut sejarah perbankan di Indonesia sebelum Juni 1983 beroperasi dengan statis karena pada waktu itu bank-bank tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan suku bunga kredit. Sulitnya izin didirikannya bank dan pembukaannya kantor cabang, serta besarnya cadangan kas wajib (reserve requirement) yang tetap. Dengan keadaan seperti ini yang diuntungkan adalah

bank-bank pemerintah karena bank tersebut sudah memiliki cabang yang menyebar ke seluruh tanah air dan didukung oleh modal yang kuat. Sebaliknya bank-bank swasta merasa karena ruang geraknya dibatasi. Akan tetapi setelah Pak Jun (kebijaksanaan Juni) 1983 yang kemudian berlanjut pada pakto (paket Oktober) 1988. Batasan-batasan tersebut kemudian diperlonggar.

Bank Indonesia semenjak 1984 mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan menyediakan fasilitas diskonto bagi perbankan. Hal ini adalah kelanjutan untuk memungkinkan pelaksanaan kebijaksanaan moneter melalui operasi besar terbuka. SBI ini dikeluarkan agar dipergunakan sebagai instrumen penanganana jangka pendek yang belum dapat disalurkan oleh perbankan. Sedangkan fasilitas diskonto yang disediakan Bank Indonesia bertujuan untuk memberikan bantuan bersifat sementara bagi bank-bank dalam pengaturan likuiditasnya. Fasilitas diskonto yang mulai diperkenalkan pada Februari 1984 merupakan bantuan Bank Sentral sebagai upaya terakhir bagi bank-bank umum mengatasi kesulitan dana yang bersifat sementara. Dalam penghimpunan dana, bank-bank pemerintah diberi kebebasan menentukan sendiri tingkat suku bunga deposito yang sebelumnya ditentukan oleh Bank Indonesia.

Kemudian tahun 1985 Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan surat semarga pasar uang (SPBU) yang digunakan sebagai instrumen kebijakan moneter tambahan yang dapat meningkatkan pengaturan likuiditas melalui pasar terbuka, disamping itu akan meningkatkan perkembangan pasar uang.

### **Paket Kebijakan 27 Oktober 1988**

Kebijakan deregulasi dibidang moneter perbankan kemudian dilanjutkan dengan paket 27 Oktober 1988 yang dikenal dengan pakto 88 merupakan serangkaian kebijakan penting dibidang moneter dan mendorong perkembangan pasar modal. apket ini mencakup pengenaan pajak pendapatan bunga deposito berjangka, kemudian pembukaan kantor bank, pembukaan kantor cabang lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Pendirian bank swasta baru dan BPR, penerbit sertifikat deposito, penurunan cadangan minimum wajib pajak, perluasan bank devisa, pendirian bank campuran, dan pembukaan kantor cabang pembantu bank asing. Untuk melengkapi kemudian dikeluarkan paket 20 Desember 88.

Paket kebijakan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal dengan pakto 88 ini mempunyai sasaran kebijakan untuk meningkatkan :

#### 1. Pergerakan Dana Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pergerakan dana masyarakat diambil beberapa langkah kebijakan, langkah-langkah yang diambil adalah seperti berikut ini: diberikannya berbagai kemudahan seperti kemudahan pembukuan kantor cabang bank, kemudian pembukaan kantor cabang lembaga keuangan bukan bank (LKBB), kemudian pendirian bank swasta baru, kemudahan pendirian dan usaha BPR, penerbitan sertifikat deposito dan perluasan tabungan.

## 2. Peningkatan Ekspor non migas

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan ekspor non migas adalah dengan langkah-langkah antara lain : perluasan bank devisa, perkreditan bank campuran, pembukaan kantor cabang pembantu asing Perluasan perdagangan valas.

## 3. Peningkatan Efisiensi

Peningkatan efisiensi perbankan dan lembaga keuangan dilakukan dengan cara mengusahakan persaingan sehat diantara lembaga-lembaga tersebut melalui iklim usaha yang diciptakan melalui penanaman dana BUMN dan BUMD bukan bank. Pada bank swasta dan LKBB, perluasan jumlah bank dan kantor cabang dan juga dikeluarkannya ketentuan batas maksimum pemberian kredit.

## 4. Peningkatan kemampuan pengendalian pelaksanaan moneter

Untuk peningkatan dalam hal ini kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan moneter dirasakan perlu disempurnakannya beberapa peralatan kebijakan moneter seperti likuiditas wajib minimum untuk perbankan yang diturunkan dari 15% menjadi 2% dari jumlah dana pihak ketiga. Disamping itu pada operasi pasar terbuka SBI dari SPBU yang semula hanya berjangka waktu 7 hari, sekarang ditambah dengan berjangka panjang samapai 6 bulan.

Kebijakan-kebijakan tersebut tentu saja memberikan angin segar bagi perkembangan industri perbankan nasional. Pihak yang merasa paling diuntungkan adalah pihak swasta dan asing sehingga dalam waktu singkat banyak

bank-bank baru berikut cabang-cabangnya bagaikan cendawan di waktu hujan. Suasana tersebut tentu saja mempengaruhi peta kekuatan perbankan yang semula sangat didominasi oleh bank pemerintah lambat laun mulai dikejar oleh peran bank umum nasional (BUSN), secara lengkap perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.3  
Pangsa Pasar Menurut Kelompok Baru  
(Dalam % Terhadap Total)

Kelompok Bank	Kredit yang Dikucurkan		Dana Masyarakat	
	1988	1995	1988	1995
Bank Pemerintah	54,4	41,8	57,5	36,9
BUSN	29,7	47,9	32,6	53,0
BAC	5,4	2,2	3,8	3,4
BPD	9,5	8,1	1,0	5,9

\* Dana masyarakat : Giro, tabungan, deposito  
Sumber: Laporan tahunan BI  
(Peacoyo Jatmiko, SHI 2000, hal 340 – 344)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pangsa pasar kredit bank pemerintah pada tahun 1980 sebesar 54,4% turun menjadi 41,8% pada tahun 1995. Sementara itu, pangsa pasar kredit BUSN naik dari 29,7% pada tahun 1980 menjadi 47,9% untuk tahun pajak 1995. Begitu juga dengan dana masyarakat yang berhasil dihimpun, pangsa pasar kredit yang di himpun BAC dan BPD pada tahun 1988 mengalami peningkatan dan pada tahun 1995 mengalami penurunan. Dari kronologis kehidupan perbankan sejak pakto 27 1988 terlihat bahwa masyarakat umum, dunia usaha maupun dunia perbankan sendiri memperoleh kebebasan yang

lebih luas dalam mengembangkan usahanya. Walaupun sangat terlambat, namun dengan dikeluarkannya ketentuan tentang persediaan bank serta pembukaan kantor cabang baru, peningkatan status sebagai bank devisa., kelonggaran dalam pendirian bank campuran, BPR. Maka telah menunjang pelaksanaan kebijaksanaan 1 Juni tersebut masih banyak bank yang belum mampu menghadapi perkembangan serta gejolak ekonomi dan moneter yang dapat terjadi saat ini. hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa struktur organisasi maupun manajemen bank-bank pada waktu itu umumnya masih sangat tergantung kepada dukungan dan bantuan bank sentral, sehingga keadaan sangat rapuh dalam menghadapi kondisi ekonomi dan moneter yang berlaku.

Dengan pakto 27 1988 diharapkan perbankan nasional menjadi lebih kokoh, mandiri dan lebih dewasa sehingga tidak lagi memerlukan dukungan demi dukungan dari bank sentral seperti masa-masa sebelumnya, namun secara bertahap dapata dikurangi dan bahkan pada suatu saat dapat dihilangkan. Namun, apa yang diberikan oleh pakto 27 1988 tersebut nampak telah dimanfaatkan oleh perbankan dengan berlebihan sehingga akibatnya dapat dilihat bahwa ekspansi moneter yang didukung dengan kuat oleh peningkatan kredit perbankan telah menimbulkan akibat-akibat negatif bagi perekonomian nasional. Ekspansi yang cepat tersebut telah membawa dampak yang kurang menguntungkan terhadap pengendalian tingkat inflasi dan juga tumbuhnya kecenderungan kearah pemanfaatan devisa yang semakin meningkat sebagai akibat berkembangnya kebutuhan impor dan spekulasi valas. Dengan mempergunakan berbagai perangkat moneter SBI dan SPBU dan dengan kebijaksanaan kontraksi melalui

“Gerakan Sumarlin” pada kuartal 1 tahun 1991, otoritas moneter mengharapkan masyarakat perbankan mampu membaca sinyal-sinyal yang dilontarkan sehingga mampu menyesuaikan diri, namun karena kurang peka atau pemahaman yang rendah terhadap langkah-langkah itu maka banyak pengelolaan bank mengambil langkah-langkah kebijaksanaan yang kurang sejalan dengan arah yang dikehendaki Bank Indonesia.

#### **4.2. Perkembangan Jumlah Kredit Perbankan (Y)**

Sejalan dengan pesatnya kemajuan ekonomi dan bisnis di Indonesia menjadikan tersedianya dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, pemberian kredit penjualan, transsportasi barang, kegiatan perdagangan (Siswanto Sutejo: 1995 : 1)

Tabel 4.4  
Perkembangan Jumlah Kredit Perbankan  
Tahun 1980 – 2000

Tahun	Jumlah Kredit (M/Rp)	Perkembangan (M/Rp)	Perkembangan (%)*
1980	4176	-	-
1981	5197	1021	24,45
1982	6513	1316	25,32
1983	6271	- 242	-3,72
1984	8098	- 1827	29,13
1985	8599	- 501	6,18
1986	8672	- 73	0,85
1987	13472	- 4800	55,35
1988	15510	- 2038	15,12
1989	16228	- 718	4,63
1990	13668	- -2560	-15,77
1991	14094	- 426	3,12
1992	14581	- 487	3,45
1993	12821	- -1760	-12,07
1994	13788	- 967	7,5
1995	17033	- 3245	23,53
1996	29292	- -12259	71,97
1997	37813	- 8521	29,08
1998	48724	- 10911	28,85
1999	22513	- -26211	-53,79
2000	26900	- 4387	19,48
Rata-rata		1588,53	262,66

Sumber: Laporan tahunan BI (berbagai edisi)

- Data olahan

Pada tabel 4.4 menunjukkan pertumbuhan jumlah kredit perbankan di Indonesia dari tahun 1986 – 2000 mempunyai kecenderungan sebesar 262,66% per tahun dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 1588,53 milyar rupiah per tahun. Penurunan jumlah kredit pada tahun 1986 dan 1998 besarnya penurunan jumlah

kredit tahun 1986 adalah 73 milyar rupiah atau sebesar 0,859 begitu pula untuk tahun 1990 menurun sebesar 426 milyar rupiah dengan persentase penurunannya sebesar 3,12%. Fenomena terjadinya penurunan kredit merupakan cerminan dari 3 faktor yang masing-masing dapat memberikan implikasi kebijakan yang berbeda-beda. Faktor pertama karena kemampuan (*ability*) perbankan untuk menyalurkan kredit terhambat karena keharusan untuk memenuhi kecukupan modal (*capital crunch*) atau terjadinya rush terhadap bank yang menghambat kemampuan bank menyalurkan pinjaman. Faktor kedua kemampuan (*Willingness*) perbankan untuk menyalurkan kredit dianggap sangat beresiko tinggi dan resiko tersebut tidak dapat diimbangi dengan suku bunga. Sedangkan faktor ketiga lemahnya permintaan kredit karena lemahnya kegiatan perekonomian (BI; 2000; 59 – 61)

#### **4.3. Perkembangan Tingkat Suku Bunga ( $X_1$ )**

perkembangan suku bunga yang terjadi pada dasarnya merupakan refleksi dari kekuatan permintaan masyarakat akan kredit dan penawaran dana masyarakat sedangkan di Indonesia masih mengalami kesenjangan antar ketersediaan tabungan masyarakat yang umumnya mengalami defisit.

Untuk menutupi defisit tabungan masyarakat harus mendatangkan dana dari luar daerah. Dalam kondisi seperti itu, dana masyarakat komoditi yang cukup langka dan berharga. Suku bunga biasanya tinggi. Tingginya tingkat suku bunga sebenarnya merupakan refleksi dari kalangan dana tersebut. Sebagai dampak dari kebijakan moneter yang ketat selama beberapa tahun belakangan ini suku bunga dimulai sejak Juli 1998, setelah Bank Indonesia mengubah sistem

lelang SBI pada akhir Juli 1998. Sejak Oktober 1998, sejalan dengan berangsur-angsur pulihnya stabilitas moneter suku bunga mulai bergerak turun. Perkembangan positif ini dilatar belakangi oleh membaiknya ekspektasi masyarakat dan stabilitas harga dan nilai tukar rupiah. Seiring dengan semakin efektifnya pengendalian uang beredar (BI, 1998: 71 – 72).

Tabel 4.5.  
Perkembangan Tingkat Suku Bunga  
Tahun 1980 – 2000

Tahun	Tingkat Suku Bunga Kredit	Perkembangan (%)
1980	16,90	-
1981	17,08	1,16
1982	17,24	-1,18
1983	17,06	1,16
1984	18,22	1,28
1985	19,50	- 1,48
1986	18,02	1,68
1987	19,70	- 0,4
1988	19,30	- 0,35
1989	18,95	1,92
1990	20,87	- 1,66
1991	19,21	- 1,66
1992	17,21	-2
1993	17,06	- 0,15
1994	14,96	-- 2,1
1995	15,75	0,79
1996	16,36	0,61
1997	18,94	2,58
1998	26,23	7,29
1999	17,80	- 8,43
2000	16,86	- 0,94
Rata-rata		0,04 %

Sumber: Laporan tahunan BI (berbagai edisi)  
\* Data olahan

Perkembangan tingkat suku bunga kredit di Indonesia mulai tahun 1980 sampai 2000 terendah terjadi pada tahun 1989 yaitu sebesar 0,4% dan tertinggi pada tahun 1998 yaitu sebesar 7,29. Rata-rata perkembangan tingkat suku bunga perbankan sebesar 0,04% per tahun. adanya kenaikan dan penurunan suku bunga kredit yang terjadi pada tahun 1998 lebih cenderung diakibatkan oleh merosotnya kondisi perekonomian Indonesia secara global.

#### **4.4. Perkembangan Dana Masyarakat (Tabungan, Giro, Deposito)**

Pertumbuhan dana masyarakat pada tahun ini mengalami kenaikan karena pihak bank mampu menghimpun dana masyarakat dimana dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkannya melalui kredit.

Perkembangan dana masyarakat mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya. Kenaikan tersebut dapat dilihat dari jumlah dana masyarakat dari tahun 1980 sampai tahun 2000.

Peningkatan jumlah dana masyarakat terbesar pada tahun 1994 yaitu sebesar 90,83% sedangkan terendah terjadi pada tahun 1982 sebesar 10,71% dengan rata-rata perkembangan sebesar 33998,5 milyar rupiah pertahun atau rata-rata perkembangan 32,65% per tahun.

Tabel 4.6  
Perkembangan Dana Masyarakat  
Tahun 1980 – 2000

Tahun	Jumlah Kredit (M/Rp)	Perkembangan (M/Rp)	Perkembangan (%)*
1980	6411	-	-
1981	8010	1599	24,94
1982	8868	858	10,71
1983	12397	3529	39,79
1984	15498	3101	25,01
1985	20174	4676	30,17
1986	23511	3337	16,54
1987	29331	5820	24,75
1988	37510	8179	27,88
1989	54375	16865	45,04
1990	83118	28745	52,86
1991	95118	12000	14,43
1992	114850	19732	20,74
1993	142679	27829	24,23
1994	170406	27727	19,43
1995	214764	44358	26,63
1996	281718	66954	31,17
1997	357613	75895	26,94
1998	273524	215911	60,37
1999	625618	52094	90,83
2000	720379	94761	15,14
Rata-rata		33998,5	32,65

Sumber: BI Cabang DIY (berbagai edisi)

\* Data olahan

#### 4.5. Perkembangan Jumlah Bank Di Indonesia (X<sub>3</sub>)

Sistem perbankan di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar sejak dikeluarkannya kebijakan moneter 1 Juni 1983, dan juga dikeluarkan kebijakan pada tanggal 27 Oktober 1988 dikenal dengan Pakto 1988. Kebijakan

ini mencakup antara lain pemberian keleluasaan bagi bank-bank swasta nasional. Bank Perkreditan Rakyat dan bank asing untuk mendirikan / membuka kantor-kantor baru atau kantor cabang baru.

Tabel 4.7  
Perkembangan Jumlah Bank  
Tahun 1980 – 2000

Tahun	Jumlah Bank (Unit)	Perkembangan (Unit)*	Perkembangan (%)*
1980	5950	-	-
1981	5955	5	0,08
1982	5919	-36	-0,60
1983	5928	9	0,15
1984	5940	12	0,20
1985	5951	11	0,18
1986	5902	-38	-0,63
1987	5895	-7	-0,11
1988	7817	1922	32,60
1989	7896	79	1,01
1990	9089	1193	15,1
1991	8488	-601	-6,61
1992	8728	240	2,82
1993	8951	223	2,55
1994	9163	212	2,36
1995	9238	75	0,81
1996	9276	38	0,41
1997	9379	103	1,11
1998	7570	-1809	-19,28
1999	7113	-457	-6,04
2000	6509	-604	-8,49
Rata-rata		27,14	0,83

Sumber: Laporan BI (berbagai edisi)  
\* Data olahan

Peningkatan jumlah bank dimulai pada tahun 1983 yaitu 5928 unit dan pada tahun 1988 naik sebesar 7817 atau meningkat 32,60%. Peningkatan jumlah bank lebih dikarenakan oleh dikeluarkannya kebijakan UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan dimana perbankan hanya dikelompokkan ke dalam kelompok bank umum dan bank perkreditan rakyat. Tentunya persaingan semakin tajam. Jumlah bank dari tahun 1980 sampai 2000 peningkatannya tidak merata, dikarenakan adanya bank-bank yang bermasalah dan pencabutan usaha 16 bank umum pada tanggal 1 November 1997.

## BAB V

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Deskriptif Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber : Bank Indonesia cabang DIY, Laporan tahunan Bank Indonesia dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Realisasi dari jumlah kredit perbankan yang disalurkan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari tabel 5.1

Data realisasi dari jumlah kredit perbankan yang di salurkan nantinya merupakan variabel dependen ( terikat ) yang akan digunakan dalam proses pengujian ( estimasi ) dengan variabel :

##### 1. Jumlah kredit perbankan

Pada tabel 5.1 menunjukkan perkembangan perbankan jumlah kredit perbankan dari tahun 1980-2000. Kenaikan yang cukup tinggi dimulai pada tahun 1987 sebesar 13472.00 milyar dan pada tahun 1996 sebesar 29292.00 milyar. Penurunan jumlah kredit perbankan juga terjadi pada tahun 1993 sebesar 12821.00 milyar. Fenomena terjadinya penurunan jumlah kredit merupakan cermin dari kemampuan perbankan untuk menyalurkan kredit terhambat karena keharusan bank untuk memenuhi kecukupan modal ( *capital crunch* ). Kemampuan perbankan untuk menyalurkan kredit dianggap beresiko tinggi dan resiko tersebut tidak dapat diimbangi dengan suku bunga, lemahnya kegiatan perekonomian.

## 2. Tingkat Suku Bunga

Kenaikan tingkat suku bunga kredit terjadi pada tahun 1985 sebesar 19,50 % dan pada tahun 1998 sebesar 26,23 %. Penurunan tingkat suku bunga terjadi pada tahun 1994 sebesar 14,96 %. Adanya kenaikan dan penurunan tingkat suku bunga kredit diakibatkan oleh merosotnya kondisi perekonomian Indonesia secara global.

## 3. Dana Masyarakat ( Deposito, Giro, Tabungan )

Kenaikan dana masyarakat dari tahun ke tahun pihak bank mampu menghimpun dana masyarakat, dimana dana tersebut disalurkan kembali pada masyarakat atau kepada pihak yang membutuhkannya melalui kredit. Peningkatan dana masyarakat terbesar pada tahun 1991 sebesar 95118.00 milyar sedangkan terendah terjadi pada tahun 1985 sebesar 20174.00 milyar.

## 4. Jumlah Bank di Indonesia

Peningkatan jumlah Bank dimulai pada tahun 1988 sebesar 7817 unit, peningkatan jumlah bank dikarenakan dikeluarkannya kebijakan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan hanya dikelompokkan kedalam kelompok bank umum dan bank Perkreditan rakyat. Dari tabel 5.1 dapat dilihat peningkatan tidak merata, dikarenakan adanya bank-bank yang bermasalah dan pencabutan 16 bank umum pada tanggal 1 November 1997.

Tabel 5.1  
 Jumlah Kredit Perbankan dan Berbagai Faktor yang Berpengaruh  
 Tahun 1980 – 2000

Tahun	Y (M/Rp)	X <sub>1</sub> (%)	X <sub>2</sub> (M/Rp)	X <sub>3</sub> (Unit)
1980	4176.000	16.90	6411.000	5950.000
1981	5199.000	17.08	8010.000	5955.000
1982	6513.000	18.24	8868.000	5919.000
1983	6271.000	17.06	12397.0015	5928.000
1984	8098.000	18.22	15980.00	5940.000
1985	8599.000	19.50	20174.00	5951.000
1986	8672.000	18.02	23511.00	5902.000
1987	13472.00	17.70	29331.00	5895.000
1988	15510.00	19.30	37510.00	7817.000
1989	16228.00	18.95	54375.00	7896.000
1990	13668.00	20.87	83118.00	9089.000
1991	14094.00	19.21	95118.00	8488.000
1992	14581.00	17.21	11485.00	8728.000
1993	12821.00	17.06	142679.0	8951.000
1994	13788.00	14.96	170406.0	9163.000
1995	17033.00	15.75	214764.0	9238.000
1996	29292.00	16.36	281718.0	9276.000
1997	37813.00	18.94	357613.0	9379.000
1998	48724.00	26.23	573524.0	7570.000
1999	22513.00	17.80	625818.0	7113.000
2000	26900.00	16.86	720379.0	6509.000

Sumber: Laporan tahunan BI (berbagai edisi)

\* Data olahan

## 5.2. Hasil Regresi

Dari hasil perhitungan regresi yang dilakukan dengan menggunakan program Time Series Processor (TSP) yang diolah dalam bentuk OLS (Ordinary Last Square) adalah sebagai berikut :

$$y = -46157,903 + 2001,7509 x_1 + 0,0318656 x_2 + 2,7632056x_3$$

$$T \text{ hitung} = (-4.4519826) \quad (4.4074071) \quad (6.5927840) \quad (3.7346685)$$

$$R^2 = 0,859111 \quad DW - \text{stat} = 1,376565$$

$$\text{Adj-}R^2 = 0,834249 \quad F\text{-statistik} = 34,55420$$

Hasil estimasi persamaan regresi linier menunjukkan nilai konstanta sebesar  $-46157,903$ , artinya jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat sebesar  $-46157,903$  milyar rupiah tidak dipengaruhi oleh suku bunga, dana masyarakat dan jumlah bank.

## 5.3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

pengujian  $R^2$  adalah mengukur proporsi atau persentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi yang diperoleh.

Dari hasil perhitungan regresi yang dilakukan diperoleh  $R^2$  sebesar 0,859111 hal ini berarti variabel independen menjelaskan variabel dependen sebesar 85,91%.

## 5.4. Pengujian Variabel Independen Secara Bersama-Sama

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui semua variabel independen secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian dilakukan menggunakan distribusi F, yaitu membandingkan F-hitung dengan F-tabel.

Dengan derajat kebebasan sebesar ( $\alpha = 5\%$ ). Maka diperoleh nilai F-tabel sebesar  $F = (5\%; k-1; n-k)$ ;  $F = (0,05; 3; 18)$  atau  $F\text{-tabel} = 3,55$ . Sedangkan F-hitung yang diperoleh dari hasil estimasi sebesar 34,55420. Karena nilai F-hitung  $>$  F-tabel atau  $34,55420 > 3,52$ , berarti secara bersama-sama variabel jumlah suku bunga kredit, jumlah dana masyarakat, jumlah bank mempengaruhi jumlah kredit perbankan di Indonesia.

### 5.5. Pengujian Variabel-Variabel Penjelas Secara Individu

Dari hasil estimasi diperoleh nilai t-hitung masing-masing variabel penjelas (independen) untuk dapat melakukan pengujian satu sisi. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.

Hasil Pengujian Variabel-Variabel Penjelas Secara Individu

	C	x1	x2	x3	
Koefisien	-46157,903	2001,7509	0,0318656	2,7632056	
Standar error	10367,943	454,17880	0,0048334	0,7398798	
T-statistik	-4,4598261	4,4074071	6,5927840	3,7346681	
$R^2$	= 0,859111		DW-stat	= 1,376565	
Adj- $R^2$	= 0,834249		F-statistik	= 34,55420	

Sumber: Laporan tahunan BI (berbagai edisi)

\* Data olahan

Dimana :

$x_1$  = Jumlah tingkat suku bunga ( milyar Rp. )

$x_2$  = Jumlah dana masyarakat (milyar Rp.)

$x_3$  = Jumlah bank di Indonesia ( unit )

Keterangan:

$x_1$  = Signifikan pada  $\alpha = 0,05$  (5%)  $\rightarrow 1,746$

$x_2$  = Signifikan pada  $\alpha = 0,05$  (5%)  $\rightarrow 1,746$

$x_3$  = Signifikan pada  $\alpha = 0,05$  (5%)  $\rightarrow 1,746$

A. Uji - t Terhadap Parameter  $x_1$  yaitu jumlah tingkat suku bunga

Hipotesis :

$H_0 : \beta_i < 0$  berarti variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

$H_0 : \beta_i > 0$  berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Dengan derajat kebebasan  $\alpha = 5\%$  dan  $df = 16$ .

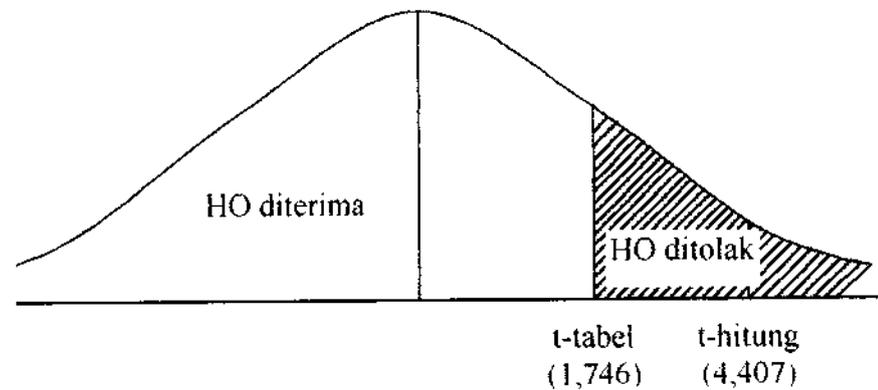
Maka nilai t-tabel = 1,746 dan untuk t-hitung = 4,4074071.

Karena nilai t-hitung  $>$  t-tabel atau  $4,4074071 > 1,746$  maka  $H_0$  ditolak artinya secara individu variabel jumlah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap jumlah kredit perbankan.

Tanda parameter tingkat suku bunga adalah positif, berarti tingkat suku bunga naik % maka jumlah kredit yang disalurkan akan naik sebesar 2001,7509 milyar rupiah

Gambar 5.1

Uji - t Variabel Secara Individu Terhadap Tingkat Suku Bunga



B. Uji - t terhadap parameter  $\beta_2$  yaitu jumlah dana masyarakat

Hipotesis :

$H_0 : \beta_2 < 0$  berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta_2 > 0$  berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan derajat kebebasan  $\alpha = 5\%$  dan  $df = 16$ .

Maka nilai t-tabel = 1,746 dan untuk t-hitung = 6,5927840

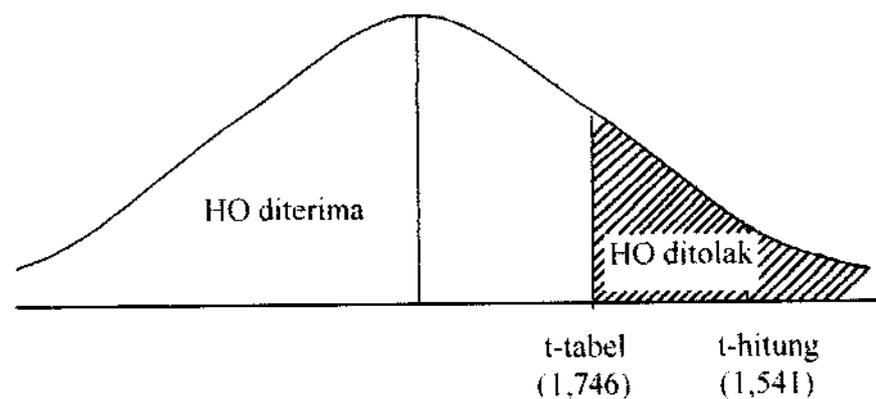
Karena nilai t-hitung > t-tabel atau  $6,5927840 > 1,746$  maka  $H_0$  diterima artinya secara individu variabel jumlah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap jumlah kredit perbankan.

Tanda parameter dana masyarakat adalah positif, berarti jika dana masyarakat naik sebesar 1 milyar rupiah, maka jumlah kredit yang

disalurkan kepada masyarakat akan naik sebesar 0,0318656 milyar rupiah.

Gambar 5.2

Uji -t Variabel Secara Individu Terhadap Jumlah Dana Masyarakat



C. Uji-t terhadap parameter  $x_3$  yaitu jumlah bank

Hipotesis :

$H_0 : \beta_3 < 0$  berarti variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

$H_0 : \beta_3 > 0$  berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Dengan derajat kebebasan  $\alpha = 5\%$  dan  $df = 16$

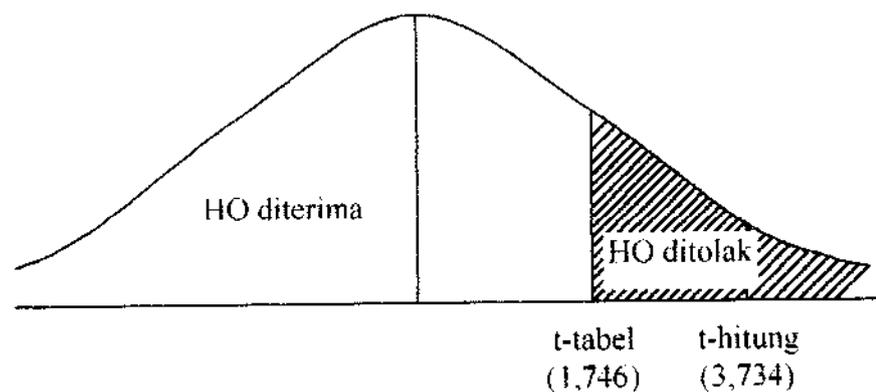
Maka nilai t-tabel = 1,746 dan untuk t-hitung = 3,7346685

Karena nilai t-hitung > t-tabel atau  $3,7346684 > 1,746$  maka  $H_0$  ditolak artinya secara individu variabel jumlah bank mempengaruhi jumlah kredit perbankan.

Tanda parameter dari jumlah bank adalah positif, berarti jumlah bank naik satu unit maka jumlah kredit yang disalurkan akan naik sebesar 2,7632056 milyar rupiah

Gambar 5.3

Uji -t Variabel Secara Individu Terhadap Jumlah Bank



## 5.6. Pengujian Asumsi Klasik

### 5.6.1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel independen lainnya atau dengan kata lain variabel independen yang satu merupakan fungsi variabel dari variabel independen lainnya. Pada lampiran terlihat bahwa dengan :

Tabel 5.3  
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Penjelas	r <sup>2</sup>	R <sup>2</sup>	Keterangan
x1, x2, x3	0,051821	0,859111	Tidak terdapat multikolinearitas
x2, x1, x3	0,088853	0,859111	Tidak terdapat multikolinearitas
x3, x1, x2	0,059124	0,859111	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber: data olahan TSP

#### 5.6.2. Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan Uji Breunc-pagan-Godfrey. Dengan model persamaannya sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$\sigma_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3$$

Dimana :

$$\sigma_1^2 = \frac{\sum U^2}{T} = \frac{RSS}{T}$$

Dilanjutkan dengan estimasi sebagai berikut :

$$\frac{U^2}{\sigma^2} = \alpha_0 + \alpha_1 Z_1 + \alpha_2 Z_2 + \alpha_3 Z_3$$

Dimana

Ho :  $\alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3$  berarti ada indikasi homoskedustisitas, dengan

$$\text{berpedoman } \frac{ESS}{2} > x^2_{p-1} \text{ tabel}$$

$H_a : \alpha_0 \neq \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3$  berarti ada indikasi heteroskedustisitas dengan

berpedoman  $\frac{ESS}{2} < x^2_{p-1}$  tabel

$$ESS = R^2 \cdot TSS$$

Keterangan :

TSS : Total Sum of Square

$R^2$  : R-Squared

RSS : Sum of Squared Resid

$$TSS = \frac{RSS}{(1 - R^2)}$$

$$ESS = R^2 \left[ \frac{RSS}{(1 - R^2)} \right]$$

$$ESS = 0,351932 \cdot \left[ \frac{0,3594579}{(1 - 0,351932)} \right]$$

$$= 0,351932 \times 0,554659$$

$$= 0,195202$$

$$TSS = \frac{0,359457}{(1 - 0,351932)}$$

$$= \frac{0,359457}{(0,648068)}$$

$$= 0,554659$$

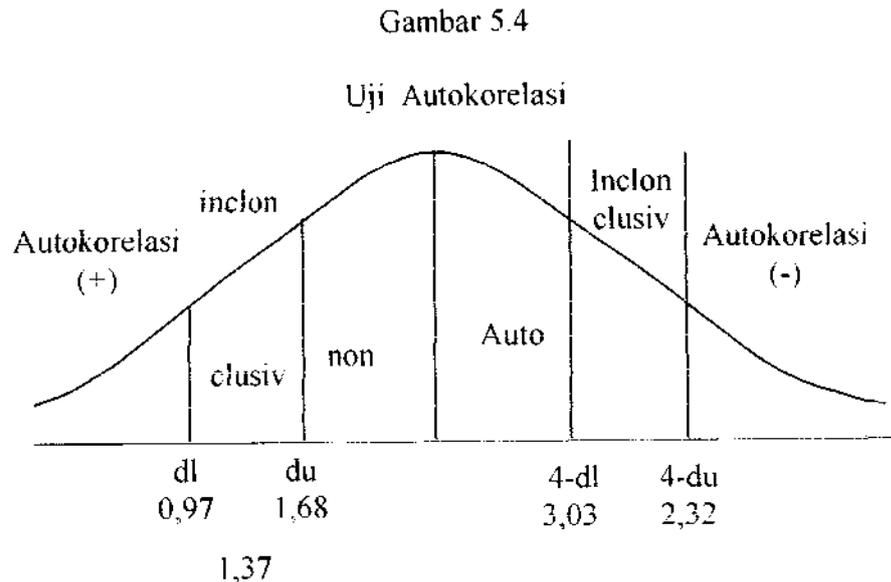
Jadi :  $X^2_{p-1}$  statistik = 0,195202 <  $X^2_{p-1}$  tabel 3,84146, sehingga  $H_0$  ditolak atau

berada di  $H_a$  yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas.

### 5.6.3. Uji Autokorelasi

Salah satu bentuk asumsi klasik adalah uji uji autokorelasi. Uji autokorelasi perlu dilakukan karena merupakan peristiwa yang biasa terdapat pada sebagian besar variabel-variabel ekonomi, untuk mendeteksi autokorelasi digunakan uji Durbin Watson. Dari kepercayaan 5% diperoleh Durbin Watson (DW-stat) sebesar 1,376565, maka diperoleh nilai kritis persamaan model sebagai berikut :

$$\begin{aligned} dl &= 0,97 & 4 - dl &= 4 - 0,97 = 3,03 \\ du &= 1,68 & 4 - du &= 4 - 1,68 = 2,32 \end{aligned}$$



Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,376565 Kesimpulan Durbin Watson uji autokorelasi berada pada daerah keragu raguan, yaitu terletak diantara  $d_l$  dan  $d_u$  atau diantara  $(4-d_u)$  dan  $(4-d_l)$  maka uji Durbin Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (Inconclusiv). Untuk nilai-nilai ini, tidak dapat disimpulkan ada tidaknya Autokorelasi diantara faktor-faktor gangguan.

### 5.7. Interpretasi Ekonomi

Hasil analisis regresi dan pengujian tahap pertama serta pengujian terhadap asumsi klasik yang telah dilakukan, ternyata tidak terkena Multikolinieritas dan heteroskedastisitas tetapi ditemukannya autokorelasi yang ada didaerah keragu-raguan. Sehingga hasil estimasi dapat diinterpretasikan lebih lanjut.

- a. Tingkat suku bunga adalah salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya investasi yang diperlukan oleh masyarakat. Variabel tingkat suku bunga ( $X_1$ ) secara statistik signifikan dan positif, yang berarti tingkat suku bunga kredit mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Artinya pada saat suku bunga tinggi ternyata tidak menurunkan minat para debitur untuk mengambil kredit, hal ini terjadi karena mereka (investor) menganggap bahwa tingkat pengembalian modal lebih besar dari suku bunga yang berlaku sehingga investor masih berani mengambil kredit.
- b. Dana masyarakat adalah uang tunai yang dikelola oleh bank yang berasal dari masyarakat luas yang terdiri dari Giro, deposito, tabungan. Variabel dana

masyarakat (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Bank sebagai alat intermediasi mampu mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat berupa kredit.

- c. Jumlah bank (X3) Berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Semakin banyak bank akan mempermudah masyarakat untuk mengambil kredit.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat suku bunga (  $X_1$  ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit perbankan. Pada saat suku bunga tinggi ternyata tidak menurunkan minat para debitur untuk mengambil kredit, hal ini terjadi karena mereka membutuhkan modal untuk investasi oleh karena itu investor masih berani untuk mengambil kredit sepanjang pengembalian modal lebih besar dari tingkat suku bunga
2. Dana masyarakat (  $x_2$  ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel jumlah kredit perbankan yang disalurkan. Bank berperan sebagai alat intermediasi mampu mengumpulkan dana masyarakat, dengan cara menaikan tingkat suku bunga deposito, memperkenalkan produk-produk yang ada di bank tersebut, sehingga masyarakat tertarik untuk menabung.
3. Jumlah bank (  $x_3$  ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan. Semakin banyaknya bank akan mempermudah atau memperlancar perkreditan sehingga masyarakat akan memilih bank yang mereka percaya.

4. Dari hasil pengujian secara keseluruhan (uji-F), nilai F hitung sebesar 27,12904 lebih besar dari F- tabel sebesar 3,55 berarti semua variabel bebas secara keseluruhan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel tidak bebas
4. Penafsiran koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,871, hal ini berarti variabel bebas dapat menjelaskan sebesar 81,7% dalam varian total variabel tidak bebas dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.
5. Pengujian pelanggaran terhadap asumsi klasik yang dilakukan lolos dari pengujian adanya multikolinearitas, heteroskedastisitas, tetapi di temukannya autokorelasi yang ada di daerah keragu-raguan tetapi dapat diobati. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi klasik.

## 6.2. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan implikasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan jumlah kredit perbankan yang disalurkan.

1. Pihak bank dalam menentukan atau mengategorikan kegiatan usaha-usaha yang benar-benar membutuhkan kredit. Sehingga bank tidak perlu khawatir atas pengembalian kreditnya saat jatuh tempo.

2. Meningkatnya jumlah bank, diperlukan peran pemerintah (BI) hal ini dikarenakan adanya pengawasan dalam menyalurkan kredit. Dengan demikian kredit yang disalurkan sampai kepada yang membutuhkannya.